



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YADI MULYADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 156139

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.010.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/60 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 910.000.000
2. Tanah Seluas 605 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/81 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 1.090.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 550.400.000

1. MOTOR, JETWIN SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000
2. MOBIL, TOYOTA VOXY MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
3. MOTOR, HONDA ADV SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 254.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 58.649.080

F. HARTA LAINNYA

Rp. 21.180.270



Sub Total	Rp.	3.894.229.350
III. HUTANG	Rp.	864.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.030.029.350

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.